

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA TAHUN**

2012-2016

SKRIPSI

DITA PURNAMASARI

105710194613



ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2018

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA TAHUN**

2012-2016

SKRIPSI

DITA PURNAMASARI

105710194613

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada
Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan**

ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2018

HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna)
kepada siapa yang dikehendaki-Nya.
Barang siapa yang mendapat hikmah itu
Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak,
Dan tiadalah yang menerima peringatan
melainkan orang-orang yang berakal”.*
(Q.S. Al-Baqarah: 269)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

JudulSkripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk
Domestik Bruto Tahun 2012-2016
Nama : Dita Purnamasari
Stambuk : 105710194613
Program Studi : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
PerguruanTinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 11 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Rusydi, M.Si
NIDN : 00 311 260 74

Pembimbing II

HJ. Naidah, SE, M.Si
NIDN : 00 100 264 403

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Unismuh Makassar

Email Rasulong, SE, MM
NBM : 903078

Ketua Program Studi IESP

Hj. Naidah, SE, M. Si
NBM : 602 417



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Sripsi ini atas Nama Dita Pumamasari Nim : 105710194613, diterima dan sahkan oleh panitian ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektorat Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0014 / SK-Y/61201/091004/2018 M. Tanggal 17 Dzulhijjah 1439 H/ 11 Agustus 2018 M. sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Dzulhijjah 1439 H
11 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN :

Pengawas umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM (Rektor Unismuh Makassar) (.....) *Dykal*

Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)

Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE,MM (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)

Penguji: 1. Dr. H. Andi Rustam, SE.,M.Si.AK.CA (.....)

2. Drs. Sanusi AM., SE., M.Si (.....)

3. Agusdiwana Suami, SE, M.ACC (.....)

4. Hj. Naidah, SE., M. Si (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Nama : Dita Purnamasari
Stambuk : 105710194613
Program Studi : IlmuEkonomidanStudi Pembangunan
JudulSkripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk
Domestik Bruto Tahun 2012-2016

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 15 setember 2018

Yang Membuat Pernyataan,

Dita Purnamasari
NIM : 105710194613

Diketahui,

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Unismuh Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Ketua Program Studi IESP

HJ. Naidah, SE., M. Si
NBM : 602 417

ABSTRACT

Dita Purnamasari. 2018, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk *Domestik* Indonesia Tahun 2012-2016 (dibimbing oleh Dr.H.Muhammad Rusyidi,M.Si Dan Hj.Naidah,SE.M.Si

Pengertian ini Bentuknya Untuk Mengetahui Dan Menganalisi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Indonesia Tahun 2012. 2016. Data di Analisis Dengan Menggunakan Analisis Imam Serderhana.

Hasil Penelitian ini Menunjukan Bahwa Pengeluaran Pemerintah Berpengaruh Positif Singnikat Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2012 2016

Kata Kunci: *Pengeluaran Pengeluaran,PRoduk Domestik Bruto Indonesia*

ABSTRACT

Purnamasari. 2018, *Government Expenditure Effect On Indonesian Domestic Products In 2012-2016* (supervised by Dr.H.Muhammad Rusyidi, M.Si And Hj.Naidah, SE.M.Si

This Understanding Forms To Know And Analyze The Effects Of Government Expenditures On Indonesian Domestic Products in 2012. 2016. The Data Are Analyzed By Using Imam Serderhana Analysis.

The Results of this Research Address That Government Expenditures Affect Positive Singnikat on Indonesia's 2016 Gross Domestic Product in 2016

Keywords: Expenditure Expenditures, Gross Domestic Product of Indonesia

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pengeluaran Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2012-2016". Serta tak lupa kita curahkansholawat kepada Nabi Muhammad SallallahuAlaihiWasallam,

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisni Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H.Muhammad Rusyidi, M.Si selaku pembimbing I dan IbuHJ,NaidahSE,M.S iselaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Ibu Hj. Naidah. SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Muhtar Husen (Ayah), yang senantiasa selalu memberikan support demi memberikan pendidikan yang baik kepada saya.Masita Muhtar (Ibu),yang senantiasa dan tidak pernah lelah menasehati, mengarahkan, mendoakan, memberikan semangat dan bantuan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Buat sahabat sahabat penulis yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.Semoga karya tulis/skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar 24 April 2018

Dita Purnamasari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan Penelitian	4
4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
5. Pengertian Pengeluaran Pemerintah.....	6
6. Fungsi Pengeluaran Pemerintah	7
7. Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	8

8.	Produk Domestik Bruto Tahun 2012-2016	12
9.	Penelitian Terdahulu	22
10.	Kerangka Pikir	27
11.	Hipotesis	28
BAB II METODE PENELITIAN.....		29
12.	Lokasi Dan Waktu Penelitian	29
13.	Teknik Pengumpulan Data.....	29
14.	Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		31
15.	Gambaran umum Kantor Badan Pusat statistik (BPS).....	31
16.	Sejarah Badan Pusat Statistik (BPS)	32
17.	Visi Dan Misi Badan Pusat Statistik.....	35
18.	Nilai-Nilai Inti Badan Pusat Statistik.....	35
19.	Tugas, Fungsi, Dan Kewenangan (BPS).....	39
20.	Pengolahan Data Badan Pusat Statistik(BPS).....	40
21.	Daftar Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) 2012-2016	48
BAB V PENUTUP		60
22.	KESIMPULAN.....	60
23.	SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA.....		62
LAMPIRAN.....		62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.PDB Berdasarkan Pengeluaran dan Sektor (Industri)	16
Tabel 2.SPDB Indonesia tahun 2012-2016.....	49
Tabel 3. PKRT di Indonesia 2013 - 2017	49
Tabel 4. PPDB Indonesia per Kuartal 2012-2016 (perubahan % Thn)	52
Tabel 5. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	53
Tabel 6. Komposisi PDB Indonesia.....	54
Tabel 7. Pertumbuhan PDB Riil (%).....	55
Tabel 8. PDB per Kapita (Dalam Dollar Amerika Serikat).....	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar1.Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah <i>rebound</i> di 2016.....	15
Gambar 2. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Sektor.....	19
Gambar 3.Pertumbuhan Kredit Bank Ke Sektor Real Estat	20
Gambar 4. Laju Pertumbuhan PDRB Perkawasan 2012-2016.....	22
Gambar 5. Gambar Bagan Kerangka Pikir.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan suatu negara adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional suatu negara dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Konsep pendapatan nasional adalah ukuran yang paling sering dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi namun bukan satu-satunya indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa dekade terakhir mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi perekonomian dunia. Pendapatan nasional sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi memperlihatkan pertumbuhan yang fluktuatif. Kondisi perekonomian Indonesia sebagai negara sedang berkembang belum mencapai kondisi *steady stated* dan suatu perekonomian sudah berada dalam keadaan stabil dan tidak mudah terkena guncangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02% di 2016 atau lebih tinggi dibanding 4,88% di 2015. Pencapaian tahun lalu ini mengerek nilai Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi Rp 12.406,8 triliun Atas Harga Dasar Berlaku (ADHB). Sementara nilai PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun lalu sebesar Rp 9.433 triliun. Nilai PDB

ADHB dan ADHK di 2016 tersebut mengalami kenaikan dibanding realisasi dua tahun sebelumnya, yakni di 2015 mencapai Rp 11.531,7 triliun (ADHB) dan Rp 8.982,5 triliun (ADHK), serta Rp 10.569,7 triliun (ADHB) dan Rp 8.564,9 triliun (ADHK) pada 2014.

Suhariyanto (2016) menjelaskan, peningkatan nilai PDB Atas Dasar Harga Berlaku di 2016 menjadi Rp 12.406,8 triliun didorong karena pertumbuhan positif pada seluruh lapangan usaha atau sektor penggerak ekonomi nasional. Berdasarkan data BPS, PDB ADHB sebesar Rp 12,406,8 triliun di 2016 disokong dari lapangan usaha di sektor industri pengolahan yang mencapai Rp 2.544,6 triliun. Sumbangan lainnya dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang Rp 1.669 triliun; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Rp 1.636 triliun; sektor konstruksi Rp 1.287,7 triliun, dan sektor pertambangan dan penggalian Rp 893,9 triliun.

Mengakhiri tahun 2016, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,94% yoy di kuartal 4, lebih rendah daripada pertumbuhan pada kuartal 4 2015 sebesar 5,04% yoy. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2016 mencapai 5,02% yoy, yang lebih tinggi daripada tahun 2015 sebesar 4,88% yoy. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi menembus 5% di kuartal 2 dan 3 sebesar masing-masing 5,18% yoy dan 5,02%. Pendapatan per kapita Indonesia juga mengalami perbaikan di tahun 2016 menjadi US\$3.605,06, setelah turun di tahun 2015 ke level 3.374,49.

Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2016 mencapai Rp 3.086,6 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 2.353,2 triliun. Ekonomi

Indonesia triwulan II-2016 terhadap triwulan II-2015 (y-on-y) tumbuh 5,18%, meningkat dibanding triwulan II-2015 sebesar 4,66% dan triwulan I-2016 sebesar 4,91%.

Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, yaitu pertumbuhan tertinggi dicapai Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh 13,51%. Dari sisi pengeluaran didukung oleh hampir semua komponen dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga yang tumbuh 6,72%.

Ekonomi Indonesia triwulan II-2016 terhadap triwulan sebelumnya tumbuh 4,02%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,90%, sedangkan dari sisi Pengeluaran pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 36,16%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I-2016 tumbuh 5,04%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar 1,01%. Sedangkan dari sisi pengeluaran didorong oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga yang tumbuh 6,56%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2016 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,81%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,02%, dan Pulau Kalimantan 7,61%.

Berdasarkan hal tersebut, terjadinya naik turun pertumbuhan ekonomi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Selain itu, jumlah uang

yang beredar juga sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan data dari BPS terhadap PDB di Indonesia terutama pada tahun 2016. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengangkat judul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2012-2016”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah “Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2012-2016?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah “Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2012-2016.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengaruhnya pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2012-2016.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah.

3. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya.
4. Hasil penelitian ini dapat memberikan alternatif dan referensi bagi penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

distribusi pendapatan yang merata melalui belanja negara baik itu belanja rutin. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan maupun belanja pembangunan. Menurut Basridan Subri (2003), pengeluaran pemerintah itu sangat bervariasi, namun secara garis besarnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.
- 2) Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
- 3) Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap masa yang akan datang.
- 4) Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menyebarkan daya beli yang luas.

Kunarjo (1996) mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah berperan dalam mempertemukan antara permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Pengeluaran pemerintah yang terus berkembang mengakibatkan penerimaan Negara harus di tingkatkan. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus dapat menggali sumber-sumber penerimaannya yang sebahagian besar berasal dari pajak.

Walaupun secara keseluruhan pengeluaran pemerintah sangat penting dalam sumbangannya terhadap pendapatan nasional, tetapi yang lebih penting lagi adalah penentuan komposisi I dari pengeluaran pemerintah tersebut. Komposisi dari pengeluaran pemerintah merupakan strategi untuk mencapai sasaran dari pembangunan nasional.

B. Fungsi Pengeluaran Pemerintah

Hyman (1996) menjelaskan pengeluaran pemerintah yang didistribusikan dengan daya beli di tengah masyarakat disebut dengan pembayaran transfer pemerintah. Pembayaran transfer ini membuat sumber-sumber pendapatan menyokong pada penerimaan yang tidak mampu menyediakan pelayanan sebagai implan dari pendapatan yang diterima kemudian. Defisit anggaran dapat mempengaruhi alokasi sumber daya (dengan mempengaruhi pengeluaran-pengeluaran pemerintah) dan seluruh ukuran sektor pemerintah dalam perekonomian. Defisit juga dapat mempengaruhi harga dan tingkat bunga dengan demikian mempengaruhi distribusi pendapatan.

Lebih lanjut Musgarve (dalam Basri dan Subri Mulyadi 2003) menjelaskan bahwa terdapat tiga fungsi utama keuangan pemerintah, sebagai berikut:

- 1) Fungsi alokasi adalah merupakan proses dimana sumber daya (*resources*) nasional yang digunakan untuk barang privat dan barang publik seperti diketahui masyarakat membutuhkan baik barang privat maupun barang publik.
- 2) Fungsi distribusi, pada hakekatnya merupakan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan dan merupakan anggaran yang berhubungan dengan

kebijakan pemerintah untuk menanggulangi masalah kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat.

- 3) Fungsi stabilisasi, penggunaan kebijaksanaan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga dan laju pertumbuhan ekonomi, yang memadai dengan memperhitungkan segala akibatnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran.

C. Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah terdiri dari pendekatan teori makro (Basridan Subri, 2003).

Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi, antara lain :

1) Hukum Wagner

Berdasarkan pengalaman empiris dari negara – negara maju (USA, Jerman, Jepang), Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Meskipun demikian, Wagner menyadari bahwa dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Kelemahan hukum Wagner adalah hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang publik, tetapi

Wagner mendasarkan pandangannya dengan teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

2) Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Namun masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.

Menurut teori Peacock dan Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh sebab itu dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya adanya perang maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu pemerintah melakukan penerimaan dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Akan tetapi perang

tidak hanya bisa dibiayai dengan pajak sehingga pemerintah juga harus meminjam dari negara lain.

Setelah perang selesai, sebetulnya pemerintah dapat menurunkan kembali tarif pada tingkat sebelum adanya gangguan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan karena pemerintah harus mengembalikan angsuran utang dan bunga pinjaman untuk membiayai perang, sehingga pengeluaran pemerintah setelah perang selesai meningkat tidak hanya karena GDP naik, tetapi juga karena pengembalian utang dan bunganya.

Menurut Mangkoesoe-broto, (2009), perkembangan pengeluaran pemerintah ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Perubahan permintaan akan barang publik
- b. Perubahan aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
- c. Perubahan kualitas barang publik.
- d. Perubahan harga-harga faktor-faktor produksi

Adapun Ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,02% pada 2016. Angka pertumbuhan itu lebih tinggi dibanding Capaian tahun 2015 sebesar 4,88%, namun lebih rendah dari asumsi dalam APBN Perubahan 2016 sebesar 5,2%. Respons positif data pertumbuhan ekonomi Indonesia, indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup menguat 35,22 poin (0,65%) menjadi 5.395,9 poin pada perdagangan kemarin. Sementara nilai tukar rupiah yang di transaksikan antar bank di Jakarta pada kemarin sore bergerak menguat sebesar

42 poin menjadi Rp 13.301, dibandingkan sebelumnya di posisi Rp 13.343 per dolar AS.

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, penyokong utama pertumbuhan ekonomi 2016 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,01% dan memberi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 56,5%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh 4,48% (kontribusi ke PDB sebesar 32,57%), dan pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPR) yang tumbuh 6,62% (kontribusi ke PDB sebesar 1,16%). Namun demikian, ekspor terkontrak sebesar 1,74% (kontribusi ke PDB sebesar 19,08%), impor minus 2,27% (kontribusi ke PDB 18,31%), dan pengeluaran konsumsi pemerintah minus 0,15% (kontribusi ke PDB 9,45%).

Sedangkan dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,90%, diikuti lapangan usaha informasi dan komunikasi yang tumbuh 8,87%. Sektor pertambangan dan penggalian meningkat seiring peningkatan produksi yang tumbuh 1,06% dibanding 2015 yang minus 3,42%. Sementara itu, struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2016 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB masing-masing 58,49% dan 22,03%, kemudian diikuti Pulau Kalimantan 7,85%, Pulau Sulawesi 6,04%, dan sisanya 5,59% dari pulau-pulau lainnya.

Perekonomian Indonesia tahun 2016 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 12.406,8 triliunan PDB perkapita mencapai Rp 47,96

juta atau US\$ 3.605,1, sedikit membaik dari tahun 2015 yang sebesar Rp 45,2 juta atau US\$3.377,1 dari PDB sebesar Rp 11.540,8 triliun.

D. Produk Domestik Bruto Tahun 2012-2016

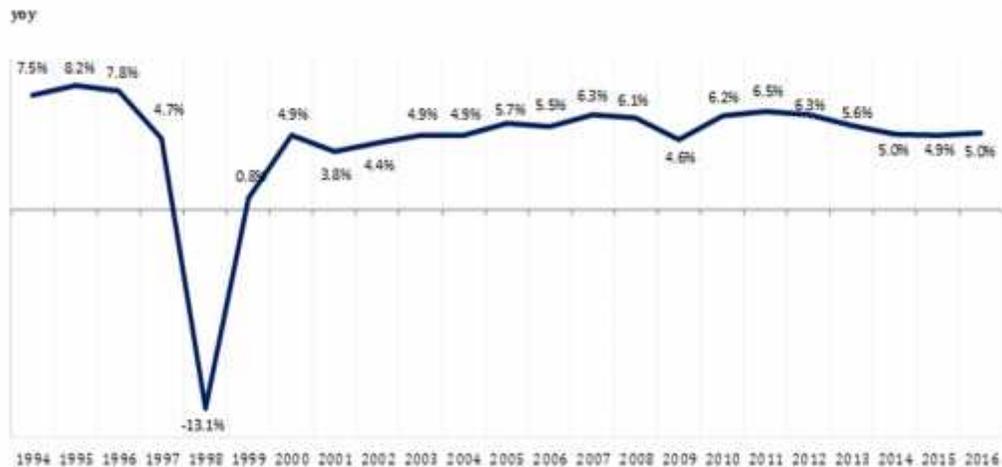
Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui pergeseran, dan struktur ekonomi suatu negara. Sementara itu, PDB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDB menurut harga berlaku dan PDB menurut harga konstan. Perhitungan Produk Domestik Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu.

- a. Pendekatan Produksi: Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (umumnya triwulan dan tahunan). 17 lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) Jasa Perusahaan, (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) jasa lainnya.
- b. Pendekatan Pengeluaran: (1). Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (2). Pengeluaran Konsumsi LNPRT (3). Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (4) Pembentukan modal tetap domestik bruto (5). Perubahan inventori, (6) Ekspor Barang dan Jasa (7) Impor barang dan jasa.
- c. Pendekatan Pendapatan: Produk Domestik Bruto merupakan jumlah balasjasa yang diterima oleh factor - faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balasjasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi) .Produk Nasional Bruto (PNB) adalah PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto luar negeri adalah pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia. Pendapatan Nasional adalah PNB dikurangi dengan pajak tidak langsung (neto) dan penyusutan.

Pajak tidak langsung neto adalah pajak tidak langsung dikurangi dengan subsidi pemerintah. Indeks implisit PDB merupakan rasio antara PDB harga berlaku dengan PDB harga konstan. Deflator PDB adalah laju pertumbuhan indeks implisit



PDB. Ekspor barang dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara lain.

Akhir tahun 2016, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,94% yoy di kuartal 4, lebih rendah daripada pertumbuhan pada kuartal 4 2015 sebesar 5,04% yoy. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2016 mencapai 5,02%

yoy, yang lebih tinggi daripada tahun 2015 sebesar 4,88% yoy. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi menembus 5% di kuartal 2 dan 3 sebesar masing-masing 5,18% yoy dan 5,02% yoy. Pendapatan per kapita Indonesia juga mengalami perbaikan di tahun 2016 menjadi US\$3.605,06, setelah turun di tahun 2015 ke level 3.374,49.

Gambar 2.1 Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah *rebound* di 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

pemerintah. Perubahan kebijakan struktural yang dilakukan pemerintah diantaranya,

- 1) Dari sisi permintaan adalah dengan mendorong sumber pertumbuhan ekonomi
- 2) Dari sisi penawaran adalah dengan mendorong peranan industri manufaktur /pengolahan Grafik 1 menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sudah menunjukkan tanda awal perbaikan di tahun 2016, setelah melewati titik terendahnya di tahun 2015. Hal ini tidak terlepas dari faktor global yang terutama terkait dengan perbaikan harga komoditas dan juga faktor dari dalam negeri yang terdorong oleh adanya perubahan kebijakan struktural dan jasa.
- 3) Dari sisi spasial adalah dengan melakukan penyebaran kegiatan ekonomi

Tabel 1. PDB Berdasarkan Pengeluaran Dan Sektor (industri)

Sumber: BPS

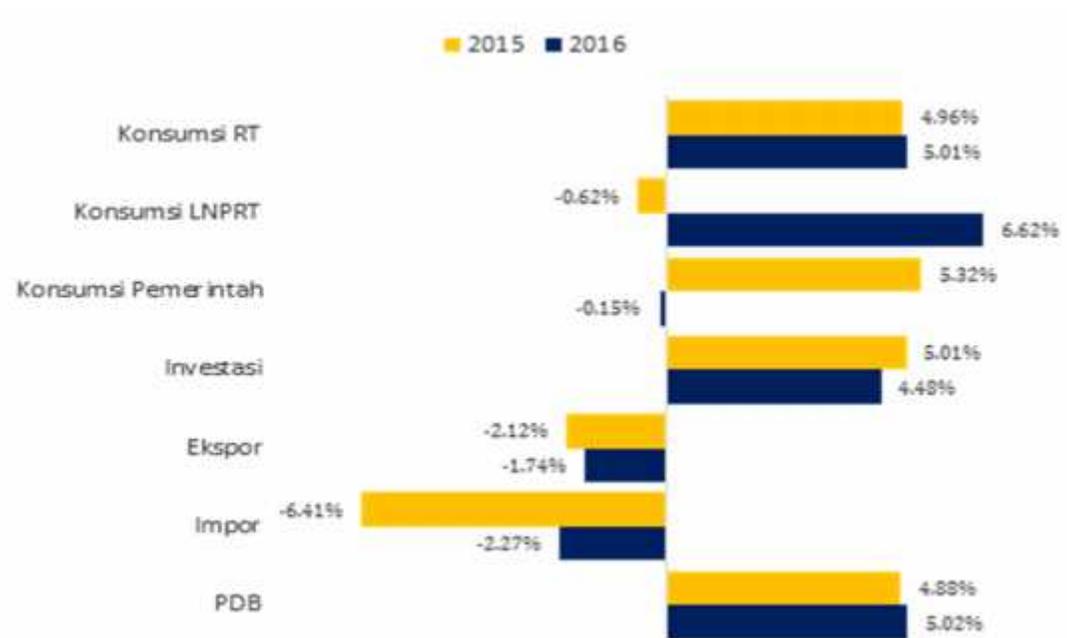
Di lihat dari sisi permintaan, yang ditunjukkan dengan PDB berdasarkan Pengeluaran pada tabel 1 dan grafik 1, terlihat bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dari Konsumsi, terutama Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,01% yoy. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami perlambatan sebesar 0,15% yoy akibat restrukturisasi APBN terkait penghematan belanja pemerintah. Secara keseluruhan, pertumbuhan Konsumsi relatif stabil akibat rendahnya inflasi yang berpengaruh positif terhadap daya beli masyarakat.

Pertumbuhan Investasi mengalami koreksidari 5,01% yoy di 2015 menjadi

	2014	2015	2016		2014	2015	2016
Pengeluaran				Sektoral			
Konsumsi	4,71%	4,91%	4,34%	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,24%	3,77%	3,25%
- Konsumsi RT	5,15%	4,96%	5,01%	Pertambangan dan Penggalian	0,43%	-3,42%	1,06%
- Konsumsi LNPR	12,19%	-0,62%	6,62%	Industri Pengolahan	4,64%	4,33%	4,29%
- Konsumsi Pemerintah	1,16%	5,32%	-0,15%	Pengadaan Listrik dan Gas	5,90%	0,90%	5,39%
Investasi	4,45%	5,01%	4,48%	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,24%	7,07%	3,60%
Ekspor	1,07%	-2,12%	-1,74%	Konstruksi	6,97%	6,36%	5,22%
Impor	2,12%	-6,41%	-2,27%	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,18%	2,59%	3,93%
				Transportasi dan Perhubungan	7,36%	6,68%	7,74%
				Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,77%	4,31%	4,94%
				Informasi dan Komunikasi	10,12%	9,69%	8,87%
				Jasa Keuangan dan Asuransi	4,68%	8,59%	8,90%
				Real Estat	5,00%	4,11%	4,30%
				Jasa Perusahaan	9,81%	7,69%	7,36%
				Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,38%	4,65%	5,19%
				Jasa Pendidikan	5,47%	7,33%	3,84%
				Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,96%	6,68%	5,00%
				Jasa lainnya	8,93%	8,08%	7,80%
PDB	5,01%	4,88%	5,02%	PDB	5,01%	4,88%	5,02%

4,48% yoy di 2016 akibat meningkatnya ketidakpastian global yang terutama

berasal dari Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Kombinasi antara perbaikan ekonomi AS dan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden ke-45 AS mendorong penguatan dolar AS yang berujung pada keluarnya dana-dana asing dari Negara berkembang, termasuk Indonesia. Sementara proses *rebalancing* ekonomi Tiongkok



kmenyebabkan pertumbuhannya terus turun, sehingga mengurangi peranannya sebagai motor pertumbuhan ekonomidunia. Disisilain, meskipun pertumbuhan ekspor masih berada di teritori perlambatan (atau pertumbuhan yang negatif) namun mengalami perbaikan yaitudari -2,12% yoy di 2015 menjadi -1,74% yoy yang didorongoleh membaiknya harga komoditas dunia. Ekspor Indonesia memang sangat tergantung pada harga komoditas karena 60% dari ekspor terkait dengan sector komoditas dan hasil tambang.

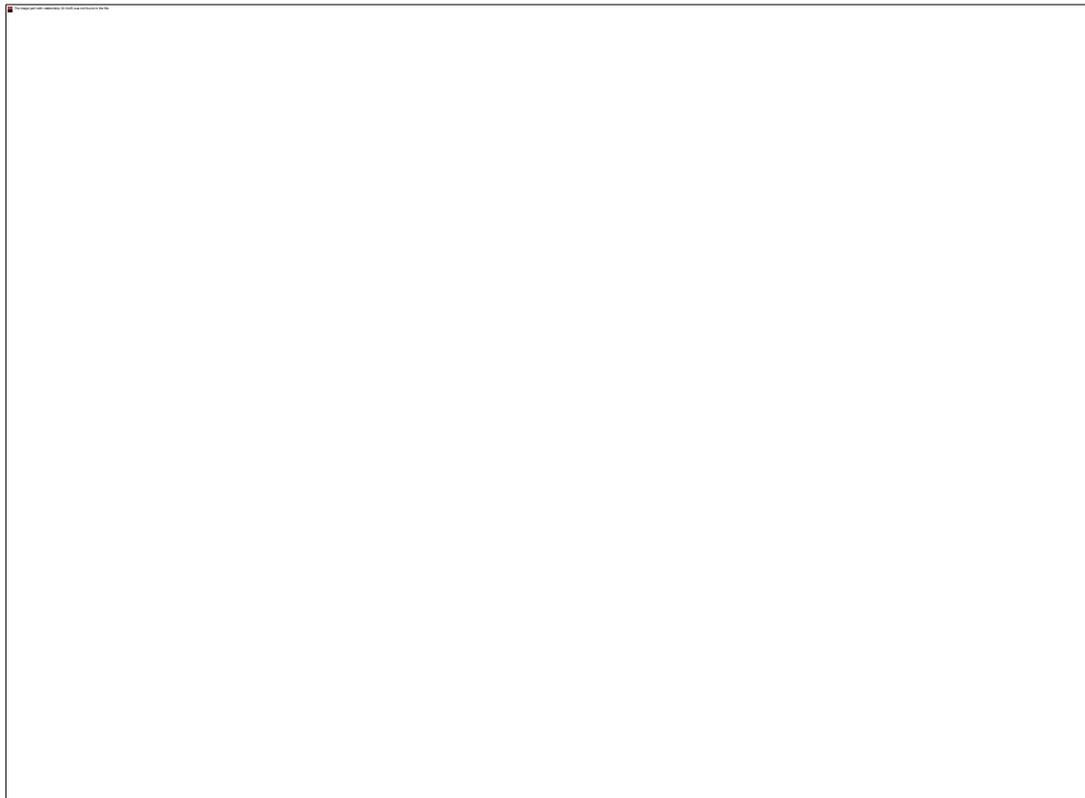
Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Penggunaan

Tabel 2.1 dan grafik 2.2 menunjukkan laju pertumbuhan dari sisi penawaran yang membagi ekonomi Indonesia menjadi 17 sektor atau industri. Laju

Sumber: BPS

pertumbuhan terbesar terjadi di sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,90% yoy yang terus mengalami kenaikan pertumbuhan sejak tahun 2014 yang salah satunya didorong oleh penurunan suku bunga. Sektor Informasi dan Komunikasi membukukan pertumbuhan tahunan terbesar kedua di tahun 2016.

Industri Pengolahan mempunyai kontribusi yang terbesar terhadap ekonomi Indonesia, yaitu sekitar 20%, namun pertumbuhannya masih rendah yaitu hanya



sebesar 4,29% di tahun 2016. Karena itulah perubahan struktural dengan menekankan pada Industri Pengolahan sangat dibutuhkan untuk dapat

mendorong pertumbuhan ekonomis nasional. Satu hal yang dapat dikatakan menggembirakan adalah kembali positifnya laju pertumbuhan sektor Pertambangan sebesar 1,06% yoy di tahun 2016 setelah mengalami perlambatan di tahun 2015.

Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Sektor

Sumber: BPS

Upaya Bank Indonesia (BI) mendorong pertumbuhan kredit perbankan dengan merelaksasi aturan *Loan to Value (LTV)* sejak Juni 2015 tampak membuahkan hasil dengan laju pertumbuhan sektor Real Estat yang meningkat menjadi 4,30% yoy di 2016, dari 4,11% yoy di 2015. Sektor Real Estat ini meliputi kegiatan penjualan atau pembelian real estat, penyewaan real estat, penyediaan jasa real estat lainnya seperti jasa penaksir real estat. Relaksasi LTV lanjutan di bulan September 2016 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit KPR kembali pada angka *double digit* di tahun 2017, yang tentunya dapat terus mendorong laju pertumbuhan sektor Real Estat di tahun ini.

Gambar 2.4 Pertumbuhan Sektor Real Estat Dan Pertumbuhan Kredit Bank Ke Sektor Real Estat

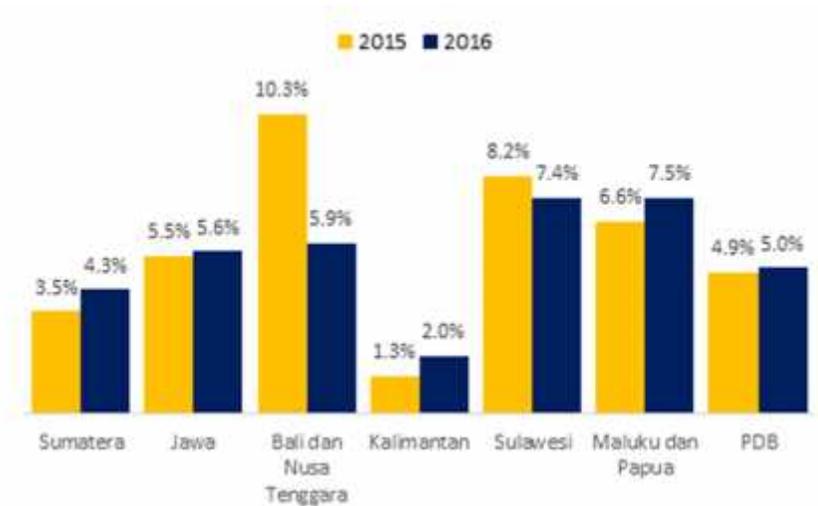


Sumber: BPS

Perkembangan PDB sektor Real Estate terbukti tidak lepas dari meningkatnya kredit perbankan ke sektor Real Estate dan juga Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Grafik 4 menunjukkan bahwa relaksasi LTV yang dilakukan di bulan Juni 2015 dapat kembali mendorong pertumbuhan kredit perbankan ke sektor Real Estate sekaligus KPR yang terus menunjukkan tren yang meningkat. Dengan semakin bergairahnya *supply* dan *demand* dari sektor Real Estate maka kami percaya bahwa *rebound* dari sektor ini akan terus berlanjut pada tahun 2017 ini. Jika dilihat secara spasial, ada empat kawasan di Indonesia yang mempunyai pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang lebih tinggi daripada PDB nasional yaitu kawasan Maluku dan Papua (7,5% yoy), Sulawesi (7,4% yoy), Bali dan Nusa Tenggara (5,9% yoy), dan Jawa (5,6% yoy). Kawasan Timur Indonesia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena ekonominya

bersumber pada industry perikanan, perkebunan, dan pariwisata. PDRB Jawa relatif stabil yang bersumber pada industri manufaktur (pengolahan).

Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan PDRB per Kawasan, 2015-2016



Sumber: BPS

Sementara kawasan Sumatera dan Kalimantan mempunyai pertumbuhan PDRB yang lebih rendah dari pertumbuhan PDB nasional, yaitu masing-masing 4,3% yoy dan 2,0% yoy, karena masih mengandalkan sumber pertumbuhan ekonomi dari industri batubara, migas, dan kelapa sawit. Meskipun demikian, pertumbuhan kedua kawasan ini di tahun 2016 sudah lebih tinggi dari pada tahun 2015. Keyakinan bahwa perbaikan ekonomi akan terus berlanjut di tahun 2017 salah satunya ditunjukkan dengan mulai naiknya penjualan sepeda motor di sentra-sentra pertambangan batubara, yang mencerminkan membaiknya daya beli masyarakat di kedua kawasan tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Muhammad Nur Afiat dalam penelitiannya “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perubahan Struktur Ekonomi di Propinsi Sulawesi Tenggara Periode tahun 1994-2008” menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap perubahan struktur ekonomi di provinsi Sulawesi Tenggara. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah, akan semakin tinggi perubahan struktur ekonomi dari sektor Pertanian ke sektor Industri dan sektor jasa. Sebaliknya, jika semakin rendah pengeluaran pemerintah, akan semakin rendah perubahan struktur ekonomi dari sektor Pertanian menuju sektor Industri dan sektor Jasa. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran pembangunan dan diarahkan pada proyek-proyek yang dapat menyerap tenaga kerja serta memperlancar aktivitas ekonomi seperti pembangunan infrastruktur (Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-Unhalu, Volume XVI, 8 Desember tahun 2015).

Merri Anitasari dan Ahmad Soleh dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Bengkulu Periode Pengamatan Tahun 2012-2016” dari hasil penelitian ini menarik dua kesimpulan yakni pertama, Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. Jika pemerintah menaikkan pengeluaran pemerintah sebesar 1 miliar rupiah, maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,17% per tahun. Kedua, Dari jumlah 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, kabupaten Rejang Lebong dan kota Bengkulu yang memiliki hasil bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Kabupaten Bengkulu

Utara memiliki pengaruh yang negatif sedangkan 7 kabupaten lainnya memiliki hasil yang positif namun tidak signifikan. Sebagian besar kabupaten di Provinsi Bengkulu dikategorikan sebagai daerah yang baru membangun yang merupakan hasil pemekaran pasca pemberlakuan otonomi daerah. Sehingga dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah dianggap belum mampu menstimulus kegiatan sektor-sektor perekonomian serta memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu dan Universitas Dehasen Bengkulu, 12 Desember 2015)

Merlin Anggraeni, Judul penelitian “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015, menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain :

1. Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dalam jangka panjang ataupun jangka pendek, signifikan dalam mempengaruhi PDB Indonesia. Pada jangka panjang, nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan sebesar 1.197529. Hal ini berarti apabila pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan meningkat sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan PDB sebesar 1,19%. Dilihat dalam jangka pendek, nilai koefisien regresi sebesar 1.589343 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap PDB Indonesia. Hal ini berarti apabila pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan meningkat sebesar 1%, akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,58%.

2. Variabel pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dalam jangka panjang dan jangka pendek signifikan dalam mempengaruhi PDB Indonesia. Pada jangka panjang, nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan sebesar 0.370760. Hal ini berarti apabila pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan meningkat sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan PDB sebesar 0,3%. Dilihat dalam jangka pendek, nilai koefisien regresi sebesar 0.324361 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap PDB Indonesia. Hal ini berarti apabila pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan meningkat sebesar 1%, akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,32%.
3. Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pertanian berpengaruh positif terhadap PDB Indonesia. Pada jangka panjang, nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah di sektor pertanian adalah sebesar 0.066870. Hal ini berarti dalam jangka panjang, perubahan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian sebesar 1% akan meningkatkan PDB sebesar 0,06%. Dilihat dalam jangka pendek, nilai koefisien regresi sebesar 0.093974 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pertanian berpengaruh positif terhadap PDB Indonesia. Hal ini berarti apabila pengeluaran pemerintah di sektor pertanian meningkat sebesar 1%, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,09%.
4. Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian secara simultan berpengaruh baik terhadap PDB dalam jangka panjang maupun jangka pendek. ECT menunjukkan tingkat kecepatan penyesuaian jangka

pendek menuju equilibrium jangka panjang. Dalam hasil estimasi ini menunjukkan nilai ECT negatif yang artinya tingkat kecepatan penyesuaian lambat (slow convergence) untuk kembali ke kondisi equilibrium. Besaran koreksi kesalahan sebesar 0.784920 mengindikasikan penyesuaian kepada kondisi equilibrium PDB adalah sebesar 1 tahun 7 bulan.

I Gusti Ayu Putri Wahyuni, Made Sukarsa dan Nyoman Yuliarmi dalam penelitian "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode Tahun 2000-2012" menghasilkan beberapa kesimpulan :

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, hal ini berarti bahwa semakin besar pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka semakin tingginya laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
2. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ini berarti bahwa Investasi tahun 2000-2012 yang mengalami peningkatan diikuti dengan laporan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Bali yang terus meningkat dan bahkan mampu menyaingi laju pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Pengeluaran Pemerintah berhubungan positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2000-2012. Hal ini berarti semakin besar pengeluaran pemerintah, maka semakin besar disparitas atau semakin timpang pendapatan masyarakat kabupaten/kota.

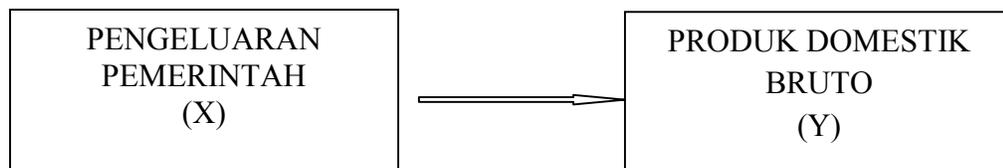
4. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali selama 2000-2012 meningkat. Hal ini berarti bahwa semakin besar investasi, makin besar disparitas atau kesenjangan pendapatan akan semakin timpang.
5. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2000-2012. Hal ini berarti semakin besar pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin besar ketimpangan yang terjadi.
6. Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2000-2012.

(ISSN : 2337-3067E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 3.8, 2014)

F. Kerangka Pikir

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Dengan perkataan lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan atau *output* per kapita. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai pasar (*total market value*) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (*final goods and services*) yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu biasanya 1 tahun.

Pertumbuhan ekonomi tidak jauh pengaruhnya dari pengaruh pengeluaran pemerintah dan jumlah uang beredar terhadap produk domestik bruto di Indonesia khususnya pada Tahun 2016. Pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah akan berpengaruh terhadap produk domestik bruto harus berdampak positif.



Gambar. 1 Bagan Kerangka Pikir

G. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah "Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia pada tahun 2012-2016."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah dikantorBadan Pusat Statistik Kota Makassar, jalan Haji Bau No. 6 Mariso, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampa iOktober tahun 2017.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Untuk memperoleh data secara terperinci dan baik, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mendatangi langsung instansi/ pihak yang terkait dengan objek penelitian, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar.

C. Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus regresi IlmiaSederhana, yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Produk Domestik Bruto(PDB)

x =Pengeluaran Pemerintah

a =Konstanta

$b x$ Persamaan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Badan Pusat Statistik (BPS)

1. Pengertian Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah Non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti Kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik.

Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Materi yang merupakan muata baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

- a) Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau untuk masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
- b) Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS dimumkan dalam berita resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
- c) Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien

- d) Dibentuknya forum masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :

- a) Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.
- b) Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya dalam membangun sistem perstatistikan nasional
- c) Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodolgi statistik dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
- d) Membangun kerjasama dengan isntitusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik indonesia.

b. Sejarah Badan Pusat Statistik (BPS)

Kegiatan statistik di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda oleh suatu lembaga yang didirikan oleh Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan (*Directeur Van Landbouw Nijverheld en Handel*) di Bogor. Pada Februari 1920, lembaga tersebut bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistic. Pada 24 September 1924, kegiatan statistik pindah ke Jakarta dengan nama *Centraal Kantoor Voor De Statistiek* (CKS) dan melaksanakan Sensus Penduduk pertama di Indonesia pada tahun 1930. Pada masa Pemerintahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945, CKS berubah nama menjadi *Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu* dengan kegiatan memenuhi kebutuhan perang/militer.

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, lembaga tersebut dinasionalisasikan dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) dan dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Setelah adanya Surat Edaran Kementerian Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 Nomor 219/S.C., lembaga KAPPURI dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dibawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perekonomian Nomor P/44, KPS bertanggungjawab kepada Menteri Perekonomian. Selanjutnya, melalui SK Menteri Perekonomian tanggal 24 Desember 1953 Nomor IB.099/M kegiatan KPS dibagi dalam dua bagian yaitu *Afdeling A* (Bagian Riset) dan *Afdeling B* (Bagian penyelenggaraan dan Tata Usaha). Berdasarkan Keppres X nomor 172 tanggal 1 Juni 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik dan bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri. Sesuai dengan UU No.6/1960 tentang Sensus, BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk serentak di pada tahun 1961. Sensus Penduduk tersebut merupakan Sensus Penduduk pertama setelah Indonesia merdeka. Sensus Penduduk di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kantor Gubernur, dan di tingkat Kabupaten/Kotamadya dilaksanakan oleh kantor Bupati/Walikota, sedangkan pada tingkat Kecamatan dibentuk bagian yang melaksanakan Sensus Penduduk. Selanjutnya Penyelenggara Sensus di Kantor Gubernur dan Kantor Bupati/Walikota ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik Daerah berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor Aa/C/9 Tahun 1965.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16/1968 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS di Pusat dan Daerah serta perubahannya menjadi PP

No.6/1980, menyebutkan bahwa perwakilan BPS di daerah adalah Kantor Statistik Provinsi dan Kantor Statistik Kabupaten atau Kotamadya. Tentang Organisasi BPS ditetapkan kembali pada PP No. 2 Tahun 1992 yang disahkan pada 9 Januari 1992. Selanjutnya, Kedudukan, Fungsi, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja BPS diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992.

Pada tanggal 26 September 1997 ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dimana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi "**Badan Pusat Statistik**", dan sekaligus menetapkan tanggal tersebut sebagai "**Hari Statistik**". Pada Keputusan Presiden No.86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik, menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan Instansi Vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kotamadya. Serta pada tanggal 26 Mei 1999, ditetapkan PP Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik di Indonesia.

D. Visi dan Misi Badan Pusat Statistik (BPS)

Adapun visi dan misi Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebagai berikut.

a. Visi

Pelopop dan statistik terpercaya untuk semua.

b. Misi

- 1) Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien.

- 2) Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia.
- 3) Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak.
- 5) Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka sistem statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

E. Nilai-nilai inti Badan Pusat Statistik (BPS)

Selanjutnya, *Core values* (nilai-nilai inti) BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai ini BPS terdiri dari :

a) PROFESIONAL

- 1) Kompeten; mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban
- 2) Efektif; memberikan hasil maksimal
- 3) Efisien; mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal
- 4) Inovatif, selalu melakukan pembaruan dan penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus
- 5) Sistematis, meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses pekerjaan yang satu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain

b) INTEGRITAS

- 1) Dedikasi; memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi
- 2) Disiplin; melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- 3) Konsisten; satunya kata dengan perbuatan
- 4) Terbuka; menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak.
- 5) Akuntabel; bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

c) AMANAH

- 1) Terpercaya; melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pola logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual.
- 2) Jujur; melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas.
- 3) Tulus; melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Adil; menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

Adapun susunan Organisasi BPS Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari :

- a) Kepala;
- b) Bagian Tata Usaha;
- c) Bidang Statistik Sosial;

- d) Bidang Statistik Produksi;
- e) Bidang Statistik Distribusi;
- f) Bidang Neraca dan Analisis Statistik;
- g) Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik;

BPS Provinsi dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas memimpin BPS Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan dilingkup provinsi dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya, serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain. Kepala dibantu oleh seseorang bagian tata usaha.

Bagian tata usaha mempunyai tugas mengkoordinasi perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya lingkungan BPS. Bagian tata usaha memiliki beberapa subbagian, yaitu subbagian kepegawaian dan hukum, subbagian keuangan, subbagian Bina Program, subbagian urusan dalam dan subbagian perlengkapan.

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik, bidang integrasi pengolahan dan desiminasi statistik terdiri dari seksi integrasi pengolahan data, seksi jaringan dan Rujukan Statistik. Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Bidang Statistik Sosial terdiri dari seksi Statistik kependudukan, seksi Statistik keajahteraan Rakyat dan seksi ketahanan Sosial.

Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang statistik produksi. Bidang Statistik Produksi terdiri dari seksi Statistik Pertanian, Seksi

Statistik Industri, dan seksi Statistik Pertambangan, Energi dan Konstruksi. Bidang Statistik Distribusi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang statistik distribusi. Bidang statistik distribusi terdiri dari seksi distribusi terdiri dari seksi statistik Harga Konsumen dan Perdagangan Besar, Seksi statistik Keuangan dan Harga Proden, dan Seksi Niaga dan Jasa.

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang neraca wilayah dan analisis statistik. Bidang Neraca dan Analisis statistik terdiri dari Seksi neraca Produksi, Seksi Neraca Konsumsi dan Seksi Analisa Statistik Lintas Sektor.

BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPS. BPS Kabupaten/kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPS Provinsi.

F. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS)

- a. Tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintah dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan
- b. Fungsi
 - 1) Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik;
 - 2) Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
 - 3) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
 - 4) Penetapan sistem statistik nasional;
 - 5) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan
 - 6) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan

tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

c. Kewenangan

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- 2) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- 3) Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- 4) Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
- 5) Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu;
 - i. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;
 - ii. Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

H. Pengolahan Data Badan Pusat Statistik (BPS)

Tahap pengolahan data sangat menentukan seberapa jauh tingkat keakuratan dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. BPS merupakan instansi perintis dalam penggunaan komputer karena telah memulai menggunakannya sejak sekitar 1960. Sebelum menggunakan komputer, BPS menggunakan kalkulator dan alat hitung sipoa dalam mengolah data.

Teknologi komputer yang diterapkan di BPS selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan juga mengacu kepada kebutuhan. Personal komputer yang secara umum lebih murah dan efisien telah dicoba digunakan untuk menggantikan mainframe. Sejak 1980-an, personal komputer telah digunakan di seluruh kantor BPS provinsi, diikuti dengan penggunaan komputer di seluruh BPS

kabupaten dan kota sejak 1992. Dengan menggunakan personal komputer, kantor statistik di daerah dapat segera memproses pengolahan data, yang merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian memasukkan data mentah ke dalam komputer dan selanjutnya data tersebut dikirim ke BPS pusat untuk diolah menjadi data nasional.

Pengolahan data menggunakan personal komputer telah lama menjadi contoh pengolahan yang diterapkan oleh direktorat teknis di BPS pusat, terutama jika direktorat tersebut harus mempublikasikan hasil yang diperoleh dari survei yang diselenggarakan. Pengolahan data Sensus Penduduk tahun 2000 telah menggunakan mesin scanner, tujuannya untuk mempercepat kegiatan pengolahan data. Efek positif dari penggunaan komputer oleh direktorat teknis yaitu selain lebih cepat, juga dapat memotivasi pegawai yang terlibat turut bertanggung jawab untuk menghasilkan sebanyak mungkin data statistik dan indikator secara tepat waktu dan akurat dibanding sebelumnya. Selain itu, penggunaan computer sangat mendukung BPS dalam menghasilkan berbagai data statistik dan indikator-indikator yang rumit seperti kemiskinan, Input-Output (I-O) table, Social Accounting Matrix (SAM), dan berbagai macam indeks komposit dalam waktu yang relatif singkat.

Pada 1993, BPS mulai mengembangkan sebuah sistem informasi statistik secara geografis khususnya untuk pengolahan data wilayah sampai unit administrasi yang terkecil yang telah mulai dibuat secara manual sejak 1970. Data wilayah ini dibuat khususnya untuk menyajikan karakteristik daerah yang menonjol yang diperlukan oleh para perumus kebijakan dalam perencanaan pembangunan. Dalam mengolah data, BPS juga telah mengembangkan berbagai program aplikasi untuk data entry, editing, validasi, tabulasi dan analisis dengan menggunakan berbagai

macam bahasa dan paket komputer. BPS bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai perangkat lunak komputer serta mentransfer pengetahuan dan keahliannya kepada staf BPS daerah.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi di BPS didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu mengikuti perkembangan permintaan dan kebutuhan dalam pengolahan data statistik; melakukan pembaharuan/inovasi dalam hal metode kerja yang lebih baik serta memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi statistik.

I. Perkembangan Produk Domestik Bruto Tahun 2012-2016

Berdasarkan perkembangan Produk Domestik Bruto Tahun 2012-2016, berikut adalah data PDB:

Rata-rata Pertumbuhan PDB (%)	
1998 – 1999	- 6.65
2000 – 2004	4.60
2005 – 2009	5.62
2010 – 2015	5.63
2016 – 2017	5.05

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PDB (dalam milyar USD)	432.2	510.2	539.6	755.0	893.0	918.0
PDB (perubahan % tahunan)	6.3	6.0	4.6	6.2	6.2	6.0

PDB per Kapita (dalam USD)	1,861	2,168	2,263	3,167	3,688	3,741
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	2013	2014	2015	2016
PDB (dalam milyar USD)	915.0	891.0	861.0	933.0
PDB (perubahan % tahunan)	5.6	5.0	4.9	5.0
PDB per Kapita (dalam USD)	3,528	3,442	3,329	3,603

Adapun untuk menghitung angka-angka PDB terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

- a) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- b) Pertambangan dan Penggalian
- c) Industri Pengolahan
- d) Listrik, Gas dan Air Bersih
- e) Konstruksi
- f) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- g) Pengangkutan dan Komunikasi
- h) Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan

- i) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- a) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- b) pengeluaran konsumsi pemerintah
- c) pembentukan modal tetap domestik bruto
- d) perubahan inventori, dan
- e) ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDB atas dasar harga pasar, karena di dalam nya sudah mencakup pajak tak langsung neto.

1. Metodologi PDB Pengeluaran

a. Metodologi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

PDB Tahunan

Penghitungan PKRT selama ini didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena data pengeluaran rumah tangga dari Susenas cenderung *underestimate* khususnya untuk kelompok bukan makanan dan makanan jadi, maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator suplai yang diperoleh dari berbagai sumber di luar Susenas. Cara yang dilakukan

adalah menggantikan (*me-replace*) hasil Susenas dengan hasil penghitungan data sekunder atas komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Asumsinya, bahwa penghitungan data sekunder lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas akan menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga (adh) berlaku. Untuk memperoleh konsumsi rumah tangga harga konstan 2010, PKRT harga berlaku terlebih dahulu dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP. Konsumsi rumah tangga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator IHK 12 kelompok COICOP yang sesuai.

PDB Triwulanan

Penghitungan PKRT triwulanan atas dasar harga (adh) berlakudidasarkanpada nilai PKRT triwulan sebelumnya dikalikan dengan Indeks Konsumsi Triwulanan hasil SKKRT. Untuk memperoleh PKRT triwulanan atas dasar harga (adh) konstandigunakanmetode deflasi, dengan deflator IHK 12 kelompok COICOP yang sesuai.

2. Metodologi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Baik penghitungan tahunan maupun triwulanan, metodologinya sbb:
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah atas dasar harga berlaku (ADHB) = output-
penjualan barang dan jasa + *social transfer in kind purchased market production*.
Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti
belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Baik penghitungan tahunan maupun triwulanan, metodologi nya sbb:
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah atas dasar harga konstan diperoleh dengan
menggunakan Metode Deflasi dan Ekstrapolasi.

3. Metodologi Pembentukan Modal Tetap Bruto

TAHUN	PDB	PENGARUH PENGELURAN
2012	7.727.083,40	25.975.172
2013	8.156.497,80	35.990.508
2014	8.564.866,60	31.757.432
2015	8.982.517,10	61.277.821
2016	9.434.632,30	55.672.199

Estimasi nilai PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung. Pendekatan "langsung" adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi produksi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan "tidak langsung" adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal pada berbagai sektor produksi, atau disebut juga sebagai pendekatan "arus komoditi". Penyediaan atau "*supply*" barang modal tersebut bisa berasal dari produk dalam negeri maupun produk luar negeri (impor).

Pendekatan secara langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi pada setiap sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, yang di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya untuk transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang berkaitan dengan pengadaan barang modal tersebut. Dari laporan keuangan perusahaan dapat diperoleh informasi/data tentang pembentukan modal tetap bruto (perubahan atas harta tetap, yang dinilai atas dasar harga berlaku (ADHB) dan harga pembelian (perolehan), pada setiap sektor. Untuk memperoleh nilai pembentukan modal atas dasar harga konstan, pembentukan modal (ADHB) tersebut di "*deflate*" dengan menggunakan indeks harga perdagangan besar yang sesuai dengan masing-masing kelompok jenis barang modalnya.

Pendekatan secara tidak langsung

Penghitungan pembentukan modal dengan cara tidak langsung disebut juga sebagai pendekatan melalui arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatannya adalah dengan menghitung nilai produk barang yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi (*supply*) yang kemudian dialokasikan sebagian menjadi barang modal. Estimasi penghitungan PMTB berupa bangunan dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output sektor konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan.

4. Metodologi Inventori

Revaluasi

Quantum X Harga

Deflasi

Perubahan Inv. Adhb: IndeksHarga

Ekstrapolasi

Jumlah Inv.tahundasarAdhk: Indeks Quantum

5. Metodologi Ekspor – Impor

PDRB Tahunan

Secara umum, penghitungan ekspor-impor barang luar negeri dalam PDRB Provinsi identik dengan penghitungan pada lembar kerja ekspor-impor dalam PDB. Namun, langkah awal yang harus dilakukan dalam penghitungan ekspor-impor PDRB Provinsi adalah rekonsiliasi sumber data utama ekspor-impor kepabeanan bersama Provinsi lainnya di bawah koordinasi Bidang Neraca dan Distribusi BPS Provinsi. Dari rekonsiliasi tersebut diharapkan diperoleh nilai bulanan ekspor (fob) dan impor (cif) dalam USD menurut Provinsi asal (ekspor) dan Provinsi tujuan (impor). Khusus impor, tidak mencakup data dari Kawasan Berikat Nasional (KBN).

Selanjutnya, dilakukan gregasi data kepabeananke dalam klasifikasi 18 kelompok komoditas barang Tabel *Supply & Use* /SUT (triwulanan) menggunakan tabel konversi HS keTabe ISUT. Untuk melengkapi cakupan, nilai ekspor-impor perlu ditambahkan besaran *Direct Purchase* danrasio *undocumente dtransactions* berdasarkan rasio yang telah disepakati. Khusus untuk impor perlu dikurangkan besaran *insurance imports* berdasarkan rasio yang juga telah ditentukan. Dengan demikian, telah diperoleh nilai ekspor-impor triwulanan atas dasar harga berlaku dalam satuan USD yang telah sesuai dengan cakupan PDRB.Untuk mendapatkan nilai ekspor-impor triwulanan atas dasar harga berlaku dalam satuan rupiah, dapat digunakan kurs tertimbang triwulan ekspor-impor.

Penghitungan ekspor-impor barang luar negeri atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2000, menggunakan pendekatan deflator.Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga per Unit (2000=100) yang digerakkan dengan laju "IHPB tertimbang Ekspor-Impor (2000=100)" per kelompok komoditas barang dalam Tabel SUT. Dengan men-*deflate* (membagi nilai triwulanan ekspor-impor adhb (dalam rupiah) terhadap setiap deflatornya, maka di peroleh nilai triwulanan ekspor-impor atas dasar harga konstan 2000 (dalam rupiah) menurut kelompok komoditas barang dalam Tabel SUT.

2. Daftar Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) di Indonesia Tahun 2012-2016

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB).PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.PDB atas dasar harga berlaku

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Tabel 2 Statistik Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2012-2016

Harga Konstan (Rp.) Tahun Dasar 2010		Harga Berlaku (Rp.)		
PDB (Milyar)	Perubahan (%)	PDB (Milyar)	Perubahan (%)	
2016	9.434.632,30	5,03	12.406.774,10	7,64
TW4	2.272.929,20	-1,73	2.939.558,70	-1,71
TW3	2.312.843,50	3,31	2.990.645,00	4,28
TW2	2.238.704,40	3,74	2.867.948,40	5,12
TW1	2.158.040,00	-0,16	2.728.180,70	1,13
2015	8.982.517,10	4,88	11.526.332,80	9,05
TW4	2.161.552,50	-2,07	2.697.695,40	-1,79
TW3	2.207.343,60	3,27	2.746.762,40	4,88
TW2	2.137.385,60	3,83	2.618.947,30	4,49
TW1	2.058.584,90	0,04	2.506.300,20	1,18
2014	8.564.866,60	5,01	10.569.705,30	10,72
TW4	2.057.687,60	-2,18	2.477.097,50	-0,56
TW3	2.103.598,10	3,28	2.491.158,50	6,34

Harga Konstan (Rp.) Tahun Dasar 2010		Harga Berlaku (Rp.)		
PDB (Milyar)	Perubahan (%)	PDB (Milyar)	Perubahan (%)	
TW2	2.036.816,60	4,00	2.342.589,50	4,80
TW1	1.958.395,50	0,49	2.235.288,50	3,07
2013	8.156.497,80	5,56	9.546.134,00	10,80
TW4	1.948.852,20	-2,25	2.168.687,70	-2,47
TW3	1.993.632,30	3,35	2.223.641,60	2,85
TW2	1.929.018,70	3,96	2.162.036,90	4,89
TW1	1.855.580,20	0,80	2.061.338,30	2,28
2012	7.727.083,40	6,03	8.615.704,50	10,01
TW4	1.840.786,20	-2,18	2.015.392,50	-1,87
TW3	1.881.849,70	3,61	2.053.745,40	6,51
TW2	1.816.268,20	3,86	1.928.233,00	5,12
TW1	1.748.731,20	0,64	1.834.355,10	3,66

Sumber: BPS

Tampak dalam tabel di atas bahwa penurunan perekonomian global yang disebabkan oleh krisis finansial global di akhir 2000-an memiliki dampak yang relatif kecil pada perekonomian Indonesia dibandingkan dengan dampak yang dialami negara-negara lain. Meskipun terjadi penurunan tajam harga-harga komoditi, turunnya pasar saham, yield obligasi domestik dan internasional yang lebih tinggi,

dan melemahnya nilai tukar rupiah, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh dengan layak. Kesuksesan ini terutama disebabkan oleh berlanjutnya konsumsi domestik yang subur. Konsumsi domestik di Indonesia (terutama konsumsi pribadi/konsumsi rumah tangga) berkontribusi untuk sekitar 55-58% dari total pertumbuhan ekonomi negara ini.

Pada akhir 2017 Bank Dunia mengatakan sekitar 52 juta orang Indonesia termasuk dalam kategori kelas menengah. Namun, perusahaan riset seperti Boston Consulting Group (BCG) dan McKinsey menetapkan *bar* yang rendah maka jumlah orang kelas menengah hitungan mereka lebih tinggi ditimbang kalkulasi Bank Dunia. Namun, semua institusi tampaknya setuju bahwa kelas menengah di Indonesia kira-kira telah berlipat ganda pada tahun 2030. Jumlah kelas menengah yang meningkat ini berpotensi besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

1. Konsumsi Rumah Tangga Yang Lemah

Sementara itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia melambat dan menjadi stagnan sejak beberapa tahun yang lalu (lihat tabel di bawah). Dengan mempertimbangkan bahwa konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 55-58% ke total pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan konsumsi rumahtangga yang stagnan mengurangi pertumbuhan makroekonomi negaranya. Penyebab di balik tren ini masih tetap sebuah misteri yang terus membingungkan para analis serta pembuat kebijakan. Dan seiring dengan berjalannya waktu, peran generasi muda itu semakin besar di dalam ekonomi Indonesia, maka perubahan dalam pembelanjaan ini sekarang dirasakan.

Tabel 3. Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Pertumbuhan (perubahan % tahunan)	5.43	5.16	4.96	5.01	4.95

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 4. Pertumbuhan PDB Indonesia per Kuartal 2012–2016 (perubahan % tahunan)

Tahun	Quarter I	Quarter II	Quarter III	Quarter IV
2016	4.92	5.19	5.01	4.94
2015	4.71	4.66	4.74	5.04
2014	5.14	5.03	4.92	5.01
2013	6.03	5.81	5.62	5.72
2012	6.29	6.36	6.17	6.11

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Proyeksi dan Pandangan untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap "positif" dalam arti bahwa sebagian besar jika tidak semua lembaga internasional dan domestik yang relevan meramalkan percepatan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia padatahun-tahunmendatang. Namun, lembaga-lembagainisudahtidaksepositifdulu (awal 2010an) waktu pertumbuhan PDB Indonesia diperkirakan segera kembali ke tingkat di atas 6% (y/y). Rupanya, pada waktu itu hanya tidak ada pengamat ekonomi yang mengerti bahwa ekonomi global terkena ketidakpastian yang berkepanjangan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat sampai dengan tahun 2016.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (perubahan % per tahun):

Tabel 5. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Lembaga	2017	2018
Pemerintah Indonesia	5.1	5.4
Bank Dunia	5.3	5.3
International Monetary Fund (IMF)	5.3	5.3
Asian Development Bank (ADB)	5.1	5.3
Realisasi	5.07	

Berbagai sumber

Jika pertumbuhan tidak dapat terangkat oleh ekspor komoditas dan konsumsi rumah tangga, maka pertumbuhan ekonomi itu perlu berasal dari perubahan struktural, yaitu (1) perkembangan industri manufaktur yang berorientasi ekspor (dan ini akan membutuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif), (2) pembangunan infrastruktur besar-besaran (yang menyebabkan efek multiplier dan mengurangi biaya logistik), dan (3) secara signifikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

PDB per kapita Indonesia dan Distribusi Pendapatan yang Tidak Setara

PDB per kapita Indonesia telah naik tajam selama satu decade terakhir (walau sempat kena perlambatan pertumbuhan di antara 2011 dan 2015). PDB perkapita Indonesia telah meningkat secara cepat pada tahun 2000-andan setelahnya.

Komposisi PDB Indonesia: Pertanian, Industri dan Jasa

Indonesia berubah dari negara yang perekonomiannya sangat bergantung pada pertanian menjadi negara yang perekonomiannya lebih seimbang, di mana

sektor manufaktur (sejenis industri) kini lebih dominan dari pada sektor pertanian. Hal ini juga menyiratkan bahwa Indonesia mengurangi ketergantungan tradisionalnya pada sektor ekspor primer.

Tabel 6. Komposisi PDB Indonesia

	2010	2017
Pertanian	15%	14%
Industri	47%	40%
Jasa	38%	46%

Salah satu karakteristik yang menonjol dari Indonesia adalah bahwa bagian barat negara Indonesia memiliki kontribusi pertumbuhan PDB yang secara signifikan lebih besar. Jawa (terutama area Jabodetabek) dan Sumatra, bersama-sama, berkontribusi untuk lebih dari 80% total PDB Indonesia. Alasan utama untuk situasi tersebut adalah bagian barat Indonesia berlokasi dekat dengan Singapura dan Malaysia. Ketiga negara tersebut dalam perjalanan sejarah telah berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi di Asia Tenggara. Sementara itu, bagian Timur Indonesia, terletak dalam jalur perekonomian yang lebih sepi dan berpenduduk jauh lebih sedikit.

PDB Indonesia dalam Perspektif Global

PDB per kapita Indonesia dan GDP riil dalam perspektif global dengan membandingkannya dengan dua kekuatan ekonomi penting: yaitu Amerika Serikat (AS) dan Cina, serta dunia.

Pertumbuhan PDB Riil (%)

Tabel 7. Pertumbuhan PDB Riil (%)

Negara	2012	2013	2014	2015	2016
Amerika Serikat	2.2	1.7	2.6	2.9	1.5
Cina	7.9	7.8	7.3	6.9	6.7
Dunia		2.6	2.8	2.7	2.5
Indonesia	6.0	5.6	5.0	4.9	5.0

Berbagai sumber

PDB per Kapita (dalam Dollar Amerika Serikat)

Tabel 8. PDB per Kapita (dalam Dollar Amerika Serikat)

Negara	2012	2013	2014	2015	2016
Amerika Serikat	51,384	52,608	54,375	55,868	57,638
Cina	6,260	7,037	7,569	7,808	8,123
Dunia	10,552	10,719	10,874	10,164	10,191
Indonesia	3,764	3,685	3,541	3,379	3,570

Berbagai sumber

Melalui sejumlah rencana pembangunan Pemerintah, Pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan angka tersebut menjadi sekitar 14.250 - 15.500 dollar AS pada tahun 2025. Dibutuhkan kebijakan Pemerintah yang efektif untuk menyediakan lebih banyak pendidikan untuk anak-anak Indonesia dan lebih banyak kesempatan kerja untuk orang-orang dewasa Indonesia.

1. Persamaan Regresi

Analisis regresi merupakan alat untuk meramalkan nilai pengaruh variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat. Model hubungan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dengan variabel lain dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut:

Tabel
Hasil Uji regresi
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	172.735	1	172.735	47.555	.020 ^a
	Residual	7.265	2	3.632		
	Total	180.000	3			

a. Predictors: (Constant), pengeluaran pemerintah

b. Dependent Variable: PDB

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	95.599	2.589		36.928	.001

pengeluaran pemerintah	-0.129	0.019	-0.980	-6.896	0.020
------------------------	--------	-------	--------	--------	-------

a. Dependent Variable: PDB

PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi

: PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi

Keterangan:

$$\text{Permintaan} \quad Y = 95,599 - 0,129x$$

Y = Produk Domestik Bruto Regional Bruto

X = Pengeluaran

A = Konstanta

B0 = Parameter Yang Diestimasi

μ = Error Tern

Persamaan regresi linear tersebut tinterpvetasl persamaan memiliki nilai negative pada konstanta yaitu 95,599 menyatakan bahwa Pengeluaran pemerintah

berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Regional bruto, yang berarti bahwa dalam rangka meningkatkan Produk Domestik Bruto ditentukan oleh pengeluaran pemerintah.

PEMBAHASAN

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan maupun belanja pembangunan. Menurut Basri dan Subri (2003), pengeluaran pemerintah itu sangat bervariasi, namun secara garis besarnya dapat diklasifikasikan.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar

PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa

tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Pembahasan Dan Hasil Penelitian Mengenai Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2012-2016

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap produk Domestik Bruto berpengaruh Positif Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2012-.2016
2. Berdasarkan undang-undang Yang Telah Disebutkan Bahwa Menyediakan kebutuhan Data Bagi Pemerintah Dan Masyarakat.data ini didapatkan dari sensuatau survey yang dilakukan sendiri atau dari
4. Pemerintah Harus membantuh kegiatan stiktik dan menyediakan Pelayanan atau Bidan

B. Saran

Berdasarkan Analisis Dan Kesimpulan Yang Telah Dikumpulkan Maka Dapat Dianjukan Saran SebagaiBerikut;

1. Agar Pemerintah Mengawasi Pengeluaran Pemerintah Agar Tidak Terjadi Ketimpangan Produk Domestik Bruto
2. Pemerintah Juga Diharapkan Menciptakan kebersamaan Untuk Menikatkan Pertumbuhan Ekonomi tahun selanjutnya

3. Agar Kiranya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Statistik Bagi Semua Pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini.2016. *Uang Beredaran Inflasi di Indonesia*.Yogyakarta .Proposal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta BPS.2017.*Ekonomi Indonesia Triwulan II 2016*.Jakarta.Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Christina, Maria. 2015. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. (online) diakses di <https://www.researchgate.net/publication/42351454> *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia* pada 3 Juni 2017 pukul 20.11 WITA.
- Dwi, Desi. 2010. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009*. Semarang. Skripsi FakultasEkonomiUniversitasDiponegoro.
- Febrianti, Elfina. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia Tahun 1974-2003*. Bandung. Artikel UPI Bandung.
- Frisyelia, dkk. 2016. *Pengaruh Investasi, Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005-2014*. Manado. Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.

- I Gusti Ayu dkk, 2014. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode Tahun 2000-2012*. (ISSN : 2337-3067E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 3.8, 2014).
- Isnaida. 2016. *Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Nilai Tukar (Kurs) Rupiah(1985-2014)*.(online) diakses di <http://ekonometrikavera.blogspot.co.id/> pada 3 Juni 2017 pukul 20.20WITA.
- Merlin Anggraeni, 2017. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015*. (JurnalPendidikandanEkonomi, Volume 6, Nomor 5, Tahun 2017).Merri Anitasari dan Ahmad Soleh, 2015. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Bengkulu Periode Pengamatan Tahun 2001-2012*. (Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu dan Universitas Dehasen Bengkulu, 12 Desember 2015).
- Mizaroh.2014.*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Uang Beredar TerhadapInflasi*.(online) diakses di <https://mizaroh.wordpress.com/ekonomi-pembangunan/97-2/> pada 3 Juni 2017 pukul 20.15WITA.
- M. Nur Afiat, 2015. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perubahan Struktur Ekonomi di Propinsi Sulawesi Tenggara Periode tahun*

1994 – 2008. (Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-Unhalu, Volume XVI, 8 Desember tahun 2015).

Nory, Sely. 2015. *Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia*. Pekanbaru. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Prio, Haryanto. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*. Semarang. Journal Fakultas Ekonomi UNNES.

Rahayu, Endang. 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara*. Medan. Journal Fakultas Ekonomi UMSU.

Winarti, Astri. 2014. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, Dan PDB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 1992-2012*. Semarang. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Makassar, 11 April 2018

Nomor : B-073/BPS/7300/560/04/2018
Lampiran : -
Perihal : **Bukti Pengambilan Data**

Kepada Yth,
Pembantu Dekan Bidang Akademik
Fakultas Ekonomi UNISMUH Makassar
di-

Makassar

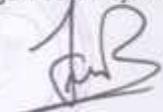
Sehubungan dengan surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Nomor: 3583/S.01/PTSP/2018, tanggal 02 April 2018 berdasarkan Surat dari Ketua LP3M Unismuh Makassar, Nomor : 154/lzn-05/C.4-VIII/III/37/2018 tanggal 30 Maret 2018, perihal Izin Penelitian maka disampaikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

N a m a : **DITA PURNAMA SARI**
N I M : 105710194613
Program Studi : IESP
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Benar telah mengambil data di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul : **"PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA TAHUN 2012-2016 "**

Demikian penyampaian kami untuk dipergunakan seperlunya.

An. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan
Kasi Jaringan dan Rujukan Statistik


ISMAIL PRANATA, S.ST
NIP: 198409022008011004

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis, yaitu Dita Purnamasari lahir di Simpasai. Pada tanggal 27 Juli 1994, merupakan anak ke-2 dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Muhtar Husen dan Ibu Masita Muhtar. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, NTB.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2007 lulus SD Impres Simpasai. Kemudian melanjutkan di SMP 3 Mohta pada tahun 2009. Penulis melanjutkan pendidikan ke SMA 1 Mohta dan lulus tahun 2012. Setelah itu kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar, Pada tahun 2013 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto Tahun 2012-2016